

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian explanatory research. Teknik pengumpulan data menggunakan survei/angket. Teknik sampel menggunakan sampel jenuh. Pengambilan data dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner pertanyaan untuk variabel X rasionalisasi anggaran dan variabel Y Kinerja Kelurahan, dimana masing-masing jawaban mengacu pada skala Likert Data yang diperoleh diolah menggunakan software SPSS.

Hasil pengujian deskriptif statistik data penelitian adalah variabel rasionalisasi anggaran dan kinerja kelurahan memiliki nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa sebaran data variabel independen dan dependen berada disekitar nilai rata-ratanya. Hasil pengujian validitas data penelitian adalah seluruh butir pernyataan pada variabel rasionalisasi anggaran dan kinerja kelurahan adalah valid. Hasil pengujian reliabilitas data penelitian dapat dijelaskan bahwa seluruh butir pernyataan yang ada pada variabel penelitian adalah reliabel. Tingkat keeratan antara variabel rasionalisasi anggaran dengan kinerja kelurahan adalah sangat kuat.

Model regresi pada penelitian ini telah memenuhi pengujian asumsi normalitas dan data layak untuk digunakan pada tahapan analisis

selanjutnya. Data pada penelitian ini tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas. Variabel rasionalisasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kelurahan. Jika variabel rasionalisasi mengalami kenaikan, variabel kinerja kelurahan juga akan mengalami kenaikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kelurahan Papanggo Jakarta Utara

Pimpinan kelurahan Papanggo Jakarta Utara sebagai perwakilan pemerintah di daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal meskipun ditengah pembatasan nilai pagu anggaran akibat adanya kebijakan rasionalisasi. Pemanfaatan pegawai, dana, material maupun teknologi informasi yang efektif dan efisien secara langsung berdampak pada kreativitas para pegawai untuk tetap menghasilkan keterlaksanaan program/kegiatan, sehingga dari pelaksanaan tersebut dapat menghasilkan *output, outcome, impact, benefit* dan manfaat bagi masyarakat secara optimal.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel independen lainnya atau juga dapat menambahkan variabel lainnya seperti variabel

mediating maupun variabel *intervening* agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Apabila melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel kinerja organisasi dalam hal ini kinerja kelurahan Papanggo di Jakarta Utara, maka disarankan untuk lebih memahami faktor-faktor lainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi juga harus diperhatikan seperti kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan anggaran di masing-masing kementerian/badan, kebijakan Bank Indonesia, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagainya. Agar memperoleh persamaan yang lebih merepresentasikan kondisi riil pada penelitian selanjutnya, maka lokus penelitian dapat diperluas dan jumlah responden sebagai sampel pengamatan maupun variabel independen lainnya dapat diperbanyak untuk melihat hasil yang lebih holistik dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, D., Ahmad S., Rinto N., (2020). Pengaruh Rasionalisasi Anggaran Terhadap Program Kerja KONI Provinsi Bengkulu Tahun 2020. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*. 1(4): 247-258.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arja, S. (2002). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2(2):1-10.
- Asrida. (2012). Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*. 1(1): 29-40.
- Azhari, I. (2020). Pengaruh Kebijakan Rasionalisasi Anggaran Terhadap Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. 7(1): 1-14.
- Bactiar, A., Iskandar. (2012). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. *Jurnal EMBA*. 4(1): 898-906.
- Bastian, I. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bratakusumah, D.S., Dadang, S. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Copper, D.W., Skindler. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Terjemahan oleh Ellen G dan Imam N)*. Jakarta: PT Erlangga.
- Dunn, W.N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitri, F., Nadirsyah. (2020). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Kapabilitas Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Aceh dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. 5(1): 69-84.
- Horne, V., Wachowicz, J. (2012). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan (Edisi Ketigabelas)*. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

- Indra, B. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, M.I. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Bisnis Multivariate dengan IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gribov, S. (2011). *John Dewey's Pragmatism and Moral Education*. Simon Fraser University: Philosophyofeducation.
- Griffin, M. (2013). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati. (2011). *Basic Econometrics 5 Edition*. New York: McGrew-Hill.
- Halim, A. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Humaidi, M.R. (2021). Rasionalisasi Laporan Bantuan Sosial Bulan Mei 2020 kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*. 4(1): 34-50.
- Janet, M.K., Willian, C.R. (2003). *Performance Budgeting for State and Local Government*. New York: M. E. Sharpe Armo.
- Keban, J.T. (1995). *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kennis, I. (1979). *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*. *The Accounting Review*. 36(4):1-10.
- Kinicki, A., Robert, K. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Loina, L.K. (2005). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.

- Mahi, A.K., Sri, I.T. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Depok: Kencana.
- Mahmudi. (2012). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Rosda.
- Mardiasmo. (2002). *Autonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marwansyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Miswar, F. (2007). *Pendidikan Politik Anggaran Bagi Masyarakat*. Banda Aceh: Solidaritas Gerakan Anti Korupsi.
- Nawawi, I. (2014). *Manajemen Perubahan: Teori dan Aplikasi Pada Organisasi Publik dan Bisnis*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nordiawan, D. (2012). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Novita, T. (2015). *Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, R. (2010). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pratiwi, R. Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap *Return on Asset* Perusahaan Pada *Took Global Computer* Periode 2006-2010. (2012). *Skripsi Dipublikasi*. Universitas Pasudan.
- Priyatno, M. (2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan STIA LAN Jakarta*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- Putra, S.D., Kadek A.M. (2017). Analisis Rasionalitas Anggaran dan Dampak Adanya Rasionalisasi Anggaran Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 7(1): 16-21.

- Rayadi, R.M. (2017). Rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. 15(2): 109-114.
- Scoot, J. (2012). *Teori Sosial Max Weber*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan Reseach & Development*. Bandung: Alfabeta.
- Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriati. (2000). Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 4(1): 1-20.
- Syafie, W., Setyoko. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor: Alqaprint.
- Trianto, A. (2016). Analisis Afektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang. *Jurnal Akuntansi*. 12(1): 73-75.
- Wahyudi, K. (2008). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo. (2014).
- Wildavsky, A. (2000). *Budgeting and Governing*. New Jersey: Transaction Publishers.
- Wildavsky, A., Naomi, C. (2012). *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta: Matapena Consultindo.
- Wijaya, F.K. (2019). Kebijakan Rasionalisasi Anggaran. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. 17(2): 85-166.
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**